



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sultan Syahrir No. 42 ☎/ Fax 21200, 25224

PANGKALAN BUN 74112

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth	Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat
Dari	Kepala Bidang Pembinaan dan Pemerintahan Desa
Terbaca	-
Tanggal	20 Juli 2020
Nomor	414 2/ A /DPMD F-PPD/VII/2020
Sifat	Binas
Lampiran	11 Lembar Ceklist BLT DD
Hal	Laporan Perjalanan Dinas Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Rekonsiliasi Data Realisasi Pelaksanaan APBDes Sampai Dengan 30 Juni 2020 (Semester I) Kecamatan Kumai

I. PENDAHULUAN

A. Umum/Latar Belakang

1. Sebagai upaya dalam pencegahan kesalahan administrasi dalam penyaluran BLT DD, maka diperlukan pengecekan administrasi dan kelengkapan dokumen BLT DD untuk masing-masing Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Perlu adanya sinkronisasi data antara Aplikasi Siskeudes dengan data pendukung yang ada terutama rekening koran demi menghasilkan Laporan Semester I yang tepat.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. DPA SKPD Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 900/18/1/DPA SKPD/2020 Tanggal 30 Desember 2019.
3. Persetujuan Kepala Dinas PMD Kotawaringin Barat tanggal 30 Juni 2020 perihal melaksanakan Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Rekonsiliasi Data Realisasi Pelaksanaan APBDes Sampai Dengan 30 Juni 2020.
4. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 841.5/119/DPMD A/VII/2020 Tanggal 24 Februari 2020 perihal Melaksanakan Perjalanan Dinas Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Rekonsiliasi Data Realisasi Pelaksanaan APBDes Sampai Dengan 30 Juni 2020 (Semester I) Kecamatan Kumai.

C. Maksud dan Tujuan :

1. Melakukan pengecekan administrasi BLT DD sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
2. Melakukan Rekonsiliasi Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
3. Mendapatkan data angka yang valid untuk laporan Keuangan Semester I Tahun 2020.
4. Untuk memberikan pembinaan dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada dalam Penatausahaan Keuangan Desa.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Desa yang dilakukan pengecekan adalah seluruh Desa di Kecamatan Kumai.
2. Rekonsiliasi Data Keuangan dan Siskeudes dengan rekening Koran sampai dengan 30 Juni 2020.
3. Pengecekan SPJ dan berkas pendukung terkait BLT DD 2020 sampai dengan yang terakhir dilaksanakan.
4. Tanya jawab penatausahaan keuangan Desa dan perbaiki aplikasi Siskeudes 2020.
5. Menyampaikan petunjuk penyusunan Laporan Semester I Tahun 2020.

III. KEGIATAN YANG DISTEMPEL

1. Pelaksanaan Rekon:

- Masih ada Desa yang mengalami trouble dalam penggunaan aplikasi Siskeudes karena adanya pergantian Operator siskeudes, pergantian Laptop, maupun karena faktor lain dari laptop (virus dll).
- Hampir semua Desa lupa cara dan teknik dalam melaksanakan penatausahaan menggunakan Aplikasi Siskeudes termasuk pelaporannya.
- Masih banyak ditemukan pola pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, misalnya penggunaan SPP Defenitif dan SPP Panjar.
- Disampaikan agar operator Siskeudes lebih mendalami teknik pengelolaan keuangan Desa menggunakan aplikasi Siskeudes, dan juga Kaur Keuangan lebih disiplin dalam menerapkan penatausahaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku.

2. Pelaksanaan Pengecekan Administrasi BLT DD

- Ditemukan penyaluran di luar pengesahan, karena ada perubahan data yg belum melalui musdesus.
- Ada beberapa Desa yang belum memiliki Berita acara atau surat pernyataan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan menolak atau tidak menerima BLT DD.
- Ada beberapa Desa yang Tanda penerimanya masih diragukan keasliannya (palsu) karena mungkin kendala teknis yg ada dilapangan (belum ketemu orangnya dsb).

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan :

1. Untuk penatausahaan berbasis aplikasi Siskeudes, sering kali digunakan hanya untuk pencairan (menghasilkan SPP) selebihnya belum dilakukan penginputan.
2. Permasalahan yang disampaikan di point 1 diatas, membuat hasil laporan tidak bisa *up to date* (*sesuai waktu*) dan lupa untuk melanjutkan proses yang ada.
3. Penyaluran BLT DD menimbulkan permasalahan administrasi yang harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

B. Saran :

1. Menghimbau Kepala Desa untuk tidak merubah Operator yang sudah menguasai Aplikasi Siskeudes, walaupun terjadi harus ada transfer ilmu terlebih dahulu.
2. Menghimbau kecamatan agar meningkatkan kapasitas pendampingan di wilayah masing-masing terutama penatausahaan Keuangan melalui aplikasi Siskeudes.
3. Monitoring berkala adalah solusi untuk pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa baik karena kesengajaan maupun ketidakpahaman regulasi.
4. Membuat Siskeudes menjadi online adalah salah satu alternatif untuk mengontrol pengelolaan keuangan Desa demi mencegah kesalahan-kesalahan dalam penggunaan Aplikasi dan intervensi secara langsung tentang kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

V. PENUTUP

Demikian laporan Perjalanan Dinas ini disampaikan untuk diketahui dan sebagai bahan lebih lanjut. Terima Kasih

Yang Melapor :

1. **Drs. SUDIHARTO**
NIP. 19670814 199603 1 003
2. **K. SUBETA RDA, SE**
NIP. 19840913 201001 1 011
3. **AGUSTINE E. BINTI, ST**
NIP. 19730819 201406 2 004
4. **FENY ATIKASARI, A.Md**
NIP. 19821226 201001 2 020

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

LAPORAN REKONSILIASI BLT DD

NO	DESA	KELENGKAPAN MUSDES PENETAPAN HASIL PENDATAAN	SK CAMAT PENGESAHAN KPM BLT - LAMPIRAN DAFTAR NAMA	PERKADES KPM BLT - LAMPIRAN DAFTAR NAMA	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)	KWITANSI PEMBAYARAN	DAFTAR PENERIMAAN BLT	SURAT PESYATAAN ATAU BERITA PEMBATALAN PENERIMA BLT	DOKUMENTASI	LAPORAN PELAKSANAAN BLT DD (PMK.40)	KETERANGAN
KECAMATAN KUMAI											
1.	Sungai Cabang	Tidak Ada	✓	✓	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Lengkap	Tidak Ada	SPP dan Kuitansi tidak dibawa
2.	Teluk Pulau	✓	✓	✓	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	SPP dan Kuitansi bulan mei tidak dibawa
3.	Sabuai	Tidak Ada	✓	✓	Tidak Ada	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	Berkas tidak dibawa
4.	Kerava	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	Tidak ada perubahan data
5.	Teluk Bogam	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berkas tidak dibawa
6.	Sungai Bakau	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berkas tidak dibawa
7.	Kubu	Tidak Ada	✓	Tidak Lengkap	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Berkas tidak dibawa
8.	Sungai Kapitan	Tidak Ada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	Dokumentasi tdk dibawa
9.	Baru Belaman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	Dokumentasi tdk dibawa
10.	Sungai Tendang	Tidak Ada	✓	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	SPP dan Kuitansi tidak dibawa
11.	Sungai Sekonyer	Tidak Ada	✓	✓	Tidak Ada	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	SPP dan Kuitansi tidak dibawa
12.	Sungai Bedaun	✓	✓	✓	Tidak Ada	Tidak Ada	✓	✓	✓	Tidak Ada	SPP dan Kuitansi tidak dibawa
13.	Bumi Harjo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	Berita Acara Musdes tidak dibawa
14.	Pangkalan Satu	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Ada	Tidak Lengkap	Tidak Ada	Berkas tidak dibawa
15.	Sabuai Timur	Tidak Ada	✓	Tidak Ada	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Ada	Tidak Lengkap	Tidak Ada	Berkas tidak dibawa